

BAB II

KONSEP-KONSEP DASAR PELESTARIAN BUDAYA TAK BENDA, DASAR HUKUM DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Konsep Kebudayaan, Komponen Pilar Kebudayaan Budaya Tak Benda

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit (kompleks), termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari (diperoleh dari proses belajar).

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia (kalimat diubah).

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism.

Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai KEBUDAYAAN adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun wujud kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya unsur-unsur kebudayaan yaitu (1) sistem kepercayaan; (2) organisasi sosial; (3) komunikasi; (4) mata pencaharian; (5) pendidikan; (6) kesehatan; (7) kesenian; (8) pengetahuan dan teknologi; (9) tata boga; dan (10) tata busana.

1) Budaya Dunia

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar “wilayah kebudayaan” Indonesia, tidak dapat dipungkiri – banyak mempengaruhi dinamika kebudayaan nasional, seperti perubahan-perubahan karakter budaya dan relasi-relasi sosial-budaya yang terjadi di dalam (di lingkup nasional). Peristiwa-peristiwa yang demikian itu, dalam hal ini dipandang sebagai satu rangkaian fenomena kebudayaan sebagai akibat dari apa yang dikenal sebagai globalisasi, yang merupakan salah satu ciri dari modernisasi. Singkatnya globalisasi merupakan proses interaksi (bahkan kontestasi) dari berbagai unsur antarkebudayaan di seluruh dunia. Maka dari itu, elemen-elemen inti dalam globalisasi yang dianggap mempengaruhi dan membentuk kebudayaan nasional telah diidentifikasi ke dalam beberapa domain, yaitu ekonomi, politik, sosial-budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah lingkungan, masalah kesehatan, hingga persoalan etika. (redaksi kalimat disusun ulang).

2) Budaya Suku Bangsa

Dalam sistem kebudayaan di Indonesia, fakta sosial memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia bersatu dan terdiri atas ratusan kelompok sukubangsa yang berbeda. Pluralitas ini bisa dibuktikan apabila kita berangkat dari asumsi bahwa satu kebudayaan atau satu sukubangsa memiliki satu ragam bahasa, maka hasil penelitian para linguist yang menyatakan bahwa di Indonesia terdapat tidak kurang dari 800 bahasa, secara tidak langsung menyatakan juga bahwa di Indonesia terdapat 800 sukubangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Oleh sebab itu, memotret kebudayaan Indonesia sama dengan memotret pluralitas kultural, atau keberagaman budaya. Ciri inilah yang kemudian menjadi penting, yang tentu saja tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia, sehingga dengan demikian sistem kebudayaan di Indonesia disokong oleh ratusan jenis sukubangsa dengan karakter dan corak kebudayaannya masing-masing, dan lebih dari itu, hal ini jugalah yang menjadi pembeda antara sistem kebudayaan di Indonesia dengan sistem kebudayaan bangsa lain di dunia. (redaksi kalimat disusun ulang).

3) Budaya Tempatan

Penanda utama budaya sukubangsa yang mudah diidentifikasi adalah bahasa dan lokasi geografisnya. Ragam sukubangsa di Indonesia antara lain: suku Jawa, Sunda, Banjar, Batak, Dayak, Buton, Tolaki, Bugis-Makassar, Minahasa, Minangkabau, suku-suku di Papua, Toraja, dan Tionghoa (diinventirisasi ulang). Sementara budaya tempatan merupakan kebudayaan yang dilahirkan berdasarkan lokasi di mana masyarakat itu hidup. Hal ini dikenal sebagai ‘wilayah budaya’ atau culture area seperti budaya pesisiran, budaya pegunungan, budaya perkotaan, budaya perdesaan, dan sebagainya. Sejumlah gaya ungkap kesenian, seperti halnya sastra yang terkait dengan bahasa, juga dapat dilihat sebagai variabel identitas budaya. Dapat disebutkan misalnya betapa teknik dan gaya tari secara kuat menandai identitas suatu sukubangsa. Demikian juga ungkapan musikalnya, baik dilihat dari sistem nada maupun teknik produksi bunyi dan kekhasan-kekhasan melodinya. Selain itu, seni rupa yang juga diwujudkan dalam bentuk tekstil khas, dapat secara kuat merujuk kepada identitas etnik pemilikinya.

Terkait dengan semua itu ada teknologi yang melekat pada hasil-hasil budaya yang khas itu. Contoh mencolok yang dapat disebutkan adalah teknik membuat kapal kayu pada orang Bugis: papan-papan disusun membentuk badan kapal dan baru

kemudian dibubuhkan kerangka luarnya. Bahkan perekat yang digunakan orang Bugis adalah getah dari pohon tertentu yang tumbuh di hutan, sebagaimana yang terdapat di Bulukumba. Teknik yang sama ternyata diterapkan di manapun orang Bugis bermukim, seperti antara lain di Sape (Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa), dan Labuan Bajo. Suku-suku bangsa tertentu yang mempunyai fokus budaya berupa pembuatan kain tenunnya yang khas seringkali juga mengenal teknik-teknik tertentu untuk memproduksi zat pewarna dari sumber-sumber alami setempat, baik tumbuhan, hewani, maupun mineral. Aspek-aspek teknologi lain yang sering dimiliki oleh suatu sukubangsa adalah dalam hal pembuatan lingkungan binaan, khususnya rumah. Teknologi arsitektural itu berkenaan dengan penyiapan dan pengolahan bahan, sampai ke penataan strukturalnya. Hal serupa juga bisa didapati dalam hal pembuatan instrument-instrumen musik yang seringkali mempunyai keunikan etniknya tersendiri.

Organisasi sosial adalah aspek lain yang dapat menunjukkan kekhasan dari suatu suku bangsa. Bentuk-bentuk khusus ikatan kekeluargaan, dari keluarga inti sampai keluarga luas, serta peruntutan garis keturunan (melalui ayah atau ibu, atau kombinasi) mempunyai variasi yang cukup luas di antara suku-suku bangsa di Indonesia. Di samping itu semua, suku-suku bangsa tertentu mengenal golongan-golongan sosial khusus yang ditentukan oleh jenis-jenis keahlian atau pekerjaan yang dimiliki. Orang Bugis misalnya, mengenal golongan bisu yang mempunyai keahlian khusus berkenaan dengan hubungan dengan alam gaib dan antara lain terkait dengan penyembuhan dan upacara-upacara ritual kerajaan. Mereka sebagai kelompok mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Peran dan keahlian semacam itu juga terdapat pada suku-suku bangsa lain tertentu, seperti para balian pada suku-suku Dayak, para datu pada masyarakat Batak, dan lain-lain, meski pada dua yang disebut terakhir itu kualifikasi khusus mereka itu lebih dilihat sebagai bersifat individual dan tidak dikaitkan sebagai penanda golongan sosial. Suatu aspek tata sosial yang bisa menunjukkan kekhususan pada berbagai kebudayaan etnik adalah juga terkait dengan dengan tata laku serta hak dan kewajiban dari golongan-golongan yang diperbedakan, seperti para orang tua yang diperbedakan hak, kewajiban dan kedudukannya dari para remaja dan anak-anak; juga kaum laki-laki yang diperbedakan dengan kaum perempuan; dan pada masyarakat etnik tertentu terdapat perbedaan berdasarkan keturunan antara 'bangsawan' dan orang kebanyakan. Sarana perbedaan antara golongan sosial itu seringkali dinyatakan melalui perbedaan busana dan bahasa, disamping hal-hal lain juga, seperti hak untuk memiliki bagian-bagian tertentu pada rumahnya, hak untuk memiliki dan menyantuni bentuk-bentuk seni pertunjukkan tertentu, dan lain-lain yang semua itu tentunya memerlukan pengkajian yang mendalam, khususnya sebelum semua perbedaan itu hilang karena dianggap 'tak sesuai lagi dengan kemajuan zaman'.

Adanya berbagai sukubangsa yang banyak di dalam tubuh bangsa Indonesia adalah suatu fakta dasar yang menyebabkan bangsa Indonesia ini perlu mengusung motto Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu, pengenalan dan pemahaman akan substansi keaneka-ragaman itu juga memberikan peluang untuk merasakan adanya kedalaman historis dari kebersamaan dalam persatuan ini. Masing-masing sukubangsa pun mempunyai sejarah budayanya yang panjang. Proses pembentukan budaya suku-suku bangsa itu telah terjadi ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Kesadaran akan ini semualah yang membuat bangsa baru, bangsa Indonesia ini, merasa mempunyai kedalaman sejarah. Di samping kebermaknaan historis itu,

keseluruhan perbendaharaan budaya suku-suku bangsa itu dapat pula dilihat sebagai “sumber kekayaan” yang senantiasa dapat digali untuk mencari unsur-unsurnya yang bisa berfungsi memperkaya kebudayaan nasional.

4) Budaya Kebangsaan

Dalam sistem kebudayaan di Indonesia terdapat budaya kebangsaan. Ada satu hal yang perlu dijelaskan sebenarnya tentang budaya kebangsaan, yakni bahwa budaya kebangsaan berbeda dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia selayaknya dipahami sebagai keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil perilaku yang digunakan untuk beradaptasi dan diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia atau dalam wilayah Indonesia. Namun di sini, pendek kata, budaya kebangsaan yang dimaksud adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil perilaku yang digunakan untuk beradaptasi dan diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat suatu bangsa.

Kebudayaan kebangsaan dalam sistem budaya Indonesia tentu saja secara historis tidak mungkin lepas dari momen lahirnya bangsa Indonesia (sejak kemunculan kesadaran akan pentingnya nasionalitas oleh kaum intelektual dan kaum muda pada awal abad ke-20) karena, nasionalitas suatu bangsa muncul setelah terbentuknya sebuah nasion dengan kedaulatan yang sah. Dari sini kemudian, Indonesia disadari atau tidak sebagai negara berdaulat menyerap hal-hal baru (baca: gagasan-gagasan baru) untuk menata bagaimana membentuk dan mengelola sebuah negara. Jika membayangkan gagasan nasionalitas merupakan salah satu lokus dari kebudayaan nasional, dan gagasan tentang nasion itu diadopsi dari model berpikir Barat, maka dengan demikian ‘budaya nasional’ adalah bagian dari sistem kebudayaan Indonesia. Dan, kenyataan itu merepresentasikan Indonesia seperti yang ditesiskan sebagai *imagined community* oleh Benedict Anderson sekitar 20 tahun lalu, di mana masyarakat Indonesia yang begitu plural dapat melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara selama lebih dari 65 tahun.

5) Budaya Keagamaan (Religi)

Salah satu pembentuk sistem kebudayaan di Indonesia adalah budaya keagamaan. Budaya keagamaan dapat pula dikatakan sebagai tradisi keagamaan. Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa agama-agama di penjuru bumi ini muncul dan berkembang seiring dengan pemahaman dan penghayatan manusia atas dunianya, atas lingkungannya. Artinya, diasumsikan bahwa agama berkembang selaras dengan perkembangan kemampuan manusia berpikir. Pengalaman-pengalaman metafisis dialami dan kemudian diyakini oleh manusia maupun sekelompok manusia tertentu. Agama disebut sebagai salah satu unsur pembentuk sistem kebudayaan lantaran hampir selalu sebuah kelompok sosial atau kebudayaan memiliki corak ekspresi religiusitas tertentu.

Ahli-ahli sosiologi dan antropologi, melihat fenomena agama sebagai fenomena sosial dan kultural, sehingga agama menjadi satu elemen penting yang memberi corak dari sebuah masyarakat, sebuah kebudayaan. Dalam perspektif persebaran kebudayaan (difusi) maupun akulturasi (hibridisasi unsur budaya), sistem kebudayaan yang berlaku di Indonesia harus mengakui pula bahwa kemunculan agama-agama besar di dunia banyak mempengaruhi perkembangan peradaban kebudayaan di Indonesia, mulai dari agama yang bersifat politeisme hingga monotheisme. Kemampuan sistem budaya kita dalam mengadopsi unsur budaya

agama, dan tentu saja beradaptasi dengan unsur-unsur baru merupakan cerminan sifat sistem kebudayaan di Indonesia yang bersifat akulturatif.

6) Komponen Pilar Kebudayaan Budaya Tak Benda

Pembangunan nasional kebudayaan diwujudkan dengan mempertimbangkan 5 (lima) pilar pembangunan yaitu: (1) jati diri dan karakter bangsa; (2) karya dan warisan budaya (benda dan takbenda); (3) diplomasi budaya, (4) kelembagaan dan SDM kebudayaan, dan (5) sarana dan prasarana budaya. Akan tetapi dalam Renstra BPNB Bali, NTB, NTT yang akan dipakai acuan beberapa pilar seperti :

a. Jati Diri

Berbeda dari binatang, manusia memiliki kesadaran. Kesadaran manusia bukan hanya terbatas pada kesadaran akan fakta (fact) belaka, melainkan juga merambah luas ke kawasan nilai (value). Oleh karena itu, hidup manusia bukan hanya tenggelam dalam kepungan fakta, melainkan dapat bertransendensi menjangkau ke alam nilai-nilai. Itulah mengapa, setiap tindakan manusia yang waras (baik tindakan "batiniah" maupun tindakan "lahiriah"), pastilah bermakna, karena setiap tindakan manusia bukan hanya merupakan gerakan mekanistik seperti mesin atau instingtif seperti hewan belaka, melainkan dilandasi atau dijiwai oleh nilai-nilai tertentu yang diyakininya, baik yang diakui dan dirumuskan secara tegas-tegas atau pun yang hanya diyakini secara diam-diam. Jadi, nilai-nilailah yang secara normatif merupakan acuan bagi perilaku kehidupan bangsa.

Apabila subjeknya bangsa Indonesia, maka acuan perilaku bangsa Indonesia ialah nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur yang dimaksud ialah seperangkat nilai yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bersama sebagai bangsa yang menegara.

Jikalau nilai-nilai luhur itu merupakan ideal-ideal yang diidamkan Bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi referensi bagi perilaku dalam mengarungi kehidupan, yang apabila semuanya berlangsung secara konsisten dan konsekuen, maka akan tampaklah identitas atau "jati diri" bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia itu tidak lain merupakan sifat dan perilaku khas bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Karakter

Kata "karakter" berasal dari bahasa Yunani "karakter" yang berarti "tanda" (mark), "tanda khusus", atau "ciri khas". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "karakter" berarti: sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; tabiat; watak. Menurut The Encyclopaedia of the Social Sciences, istilah karakter secara umum menunjuk organisasi sifat khas yang membedakan satu individu dari individu yang lain. Dalam arti yang paling luas, istilah karakter itu berpadanan arti dengan

individualitas; namun dalam diskusi praktis, istilah tersebut terutama berlaku untuk kelompok sifat yang memiliki makna sosial dan moral. Dalam Collier's Encyclopedia dikatakan bahwa istilah karakter, apabila ditelusur ke belakang, ternyata sudah digunakan kira-kira abad ke-5 SM. Pada masa itu istilah karakter digunakan untuk menunjuk "tanda khas" atau "ciri khas" dari individu yang berkaitan dengan ideal-ideal dan perilaku sebagaimana diputuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan kekuatan kehendak. Sementara itu, dalam Ensiklopedi Indonesia, istilah karakter dirujuk dan dipadankan dengan istilah watak, yang dimaknai sebagai keseluruhan dari segala macam perasaan dan kemauan; menampak keluar sebagai kebiasaan, cara bereaksi terhadap dunia luar, dan pada ideal-ideal yang diidam-idamkannya. Watak seseorang berdasarkan insting, bakat kemauan, dan bakat perasaan orang yang bersangkutan. Bagaimana watak seseorang terbentuk bergantung kepada pengalamannya.

Dari nukilan atas sumber-sumber di atas dapat dicatat sejumlah kata kunci yang penting berkenaan dengan istilah karakter. Secara etimologis, istilah karakter sendiri berarti "ciri khas". Disebut ciri khas, karena "barang sesuatu" atau hal yang ditunjuk tersebut berbeda dari yang lain. Makna etimologis saja tentu belum cukup untuk menggambarkan konsep yang dikandung oleh istilah karakter. Secara terminologis, istilah karakter mengandung sejumlah komponen makna yang penting, di antaranya:

- (1) organisasi sifat yang khas (berbeda dari yang lain);
- (2) memiliki makna sosial (dalam kaitannya dengan hidup bersama dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu);
- (3) memiliki makna moral (berkenaan dengan perbuatan apa yang dianggap "baik" atau "buruk/jahat");
- (4) bekerjanya (sesuai) kehendak (berkenaan dengan tekad dan keteguhan hati);
- (5) cara bereaksi atau bertindak atau berperilaku dalam menghadapi kehidupan yang senantiasa berada dalam ketegangan antara kenyataan faktual (realitas telanjang sebagaimana dihadapi dalam keseharian) atau das Sein dan ideal-ideal yang diidamkannya (nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi) atau das Sollen.

Tampak bahwa secara teoritik, istilah karakter ternyata tidak dengan mudah dirumuskan dengan sederhana dan dalam satu tarikan nafas belaka. Di samping itu, istilah karakter acapkali juga dikacaukan dengan temperamen, kepribadian, dan moralitas. Meskipun harus diakui, ketiga istilah itu memang selalu bersinggungan dengan karakter, bahkan dapat dikatakan ketiganya merupakan semacam komponen atau dimensi karakter (kalimat diperbaiki).

Memang tidak mudah menyederhanakan makna yang dikandung istilah karakter, namun dalam keperluan perencanaan ini, konsep karakter harus dirumuskan sebagai suatu "definisi operasional" agar diperoleh "kiblat" atau "pegangan". Karakter ialah sekumpulan sifat khas yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral seseorang dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangan dan problematikanya. Rumusan ini menunjuk kepada subjek individual, karena pada dasarnya karakter sesungguhnya berkenaan dengan individu. Namun dalam konteks perencanaan ini, yang hendak dikaji ialah karakter bangsa. Dengan menyebut karakter bangsa, yakni bangsa Indonesia, berarti diam-diam sudah diandaikan bahwa suatu bangsa dianggap sebagai suatu entitas komunitas yang nyata. Kalau demikian, maka yang dimaksud

dengan karakter bangsa Indonesia ialah sekumpulan sifat khas bangsa Indonesia yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral seseorang dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangan dan problematikanya.

Pembangunan kebudayaan pada intinya ialah pembangunan manusia. Membangun manusia berarti bukan hanya membangun dimensi keragaan atau jasmaniahnya belaka, melainkan sekaligus membangun dimensi kejiwaan atau batiniahnya. Membangun dimensi kejiwaan atau batiniah manusia, berarti membangun dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas manusia dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangan dan problematikanya. Dan, dalam konteks keindonesiaan, secara lebih spesifik lagi ialah membangun dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas bangsa dalam menghadapi tantangan dan problematika hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas bangsa, tidak lain adalah pembangunan jati diri dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pembangunan jati diri dan karakter bangsa merupakan salah satu pilar (sangat) penting, bahkan paling penting, bagi pembangunan kebudayaan secara keseluruhan.

Pembangunan jati diri dan karakter bangsa amat penting bagi pencapaian cita-cita luhur atau visi utama Bangsa Indonesia yang telah bertekad melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan mendirikan negara dan pemerintahan sendiri, yakni ingin menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: didirikanlah negara Republik Indonesia dan dibentuklah Pemerintah Indonesia yang tugas pokoknya ialah (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan nilai-nilai perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah misi (tujuan) utama didirikannya negara, yang direpresentasikan (diamanatkan) dalam tugas pokok pemerintahan negara. Para penyelenggara negara, yakni aparatur negara dari pusat hingga daerah atau unit terkecil pemerintahan negara, beserta seluruh komponen bangsa, yang nota bene merupakan warga negara Indonesia, manusia Indonesia, dituntut memiliki jati diri dan karakter yang mampu menopang upaya pencapaian visi dan misi negara tersebut.

Karakter bangsa harus dibangun dengan sungguh-sungguh dan pembangunan itu harus merupakan usaha sadar yang terencana, terarah, dan sistematis agar karakter bangsa dapat mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, yakni sifat dan perilaku khas Bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berlangsung secara seksama dan menghantarkan Bangsa Indonesia menuju kepada kehidupan yang sungguh-sungguh merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Karakter bangsa seharusnya menjadi arus utama (mainstream) dalam pembangunan nasional kebudayaan, artinya dalam setiap upaya pembangunan harus selalu memikirkan keterkaitan dan dampaknya terhadap pengembangan karakter. Dengan demikian, dapat diharapkan karakter yang terbentuk nantinya akan mengarah ke hal yang bernilai positif. Jati diri dan karakter bangsa di sini berada pada tataran ide, maksudnya tidak berbentuk secara nyata atau empiris, tetapi hanya dapat dirasakan dampaknya. Jika karakter bangsa ini memang baik, maka hal itu akan terasa (berpengaruh) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, karakter bangsa ini merupakan hal yang vital bagi pembangunan nasional kebudayaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2010: 1-2).

c. Pelestarian Karya Budaya Tak Benda

Berdasarkan konvensi, yang di maksud dengan WBTB (*intangible culture*) yaitu berbagai praktek representasi, ekspresi, pengetahuan keterampilan serta instrumen-instrumen, objek, artefak, dan lingkungan budaya yang terkait meliptui berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya mereka.

Warisan budaya tak benda/WBTB (*intangible culture*) wujudnya antara lain :

1. Tradisi dan ekspresi lisan (contoh : cerita rakyat, naskah kuno, permainan tradisional),
2. Bahasa,
3. Seni Pertunjukan (seni visual, seni teater, seni suara, seni musik, tari, film),
4. Adat istiadat masyarakat,
5. Ritus,
6. Perayaan-perayaan (sistem ekonomi tradisional, organisasi sosial, upacara tradisional),
7. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta (contoh : pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional),
8. Kemahiran kerajinan tradisional (seni lukis, pahat/ukir, arsitektur, pakaian tradisional, aksesoris, mode tradisi, transport tradisional),
9. Makanan (Kuliner) Tradisional,
10. Pasar Tradisional.
11. Catatan WBTB wilayah NTT yang sedang perhatian dari pemerintah untuk disusulkan ke UNESCO diantaranya : Tenun Sumba Timur, Tumah Tradisional Wairebo.

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang ada di Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB, NTT 39 orang, terdiri dari : Peneliti Utama 1 orang, Peneliti Madya 3 orang, Peneliti Muda 12 orang, Penilit Pertama 6 orang, Calon Peneliti 3 orang. Sedangkan tenaga administirasi sebagai penunjang kegiatan teknis 13 orang. Pengelolaan administrasi kantor di pimpin oleh seorang Kepala balai dengan tingkat eselon IIIa dan dibantu oleh seorang Kasubag. TU dengan tingkat eselon IVa.

B. Dasar Hukum

- a. Kep. Mendikbud No.: 0303/O/1995, tanggal 4 Oktober tentang Pendirian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- b. Kep. Menbudpar No.: KM52/OT/MKP/2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- c. Renstra Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tahun 2005.
- d. Ketetapan MPR RI Nomor IV/1999 tentang GBHN (Kebijakan Pembangunan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata).
- e. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Propenas.
- f. Keputusan Kepala LAN, Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005.
- h. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.38/OT.001/MKP-2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- i. Renstra Kementerian Budpar 2010-2014 tahun 2011.
- j. Renstra Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film 2010-2014 tahun 2011
- k. Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- l. DIPA Nomor : 0072 /040-03.3.2.01/20/20011, tanggal 20 Desember 2010.
- m. DIPA BPSNT 2011
- n. DIPA BPNB 2012
- o. DIPA BPNB 2013

C. Arah Kebijakan

1. Arah Kebijakan dan Strategi dalam rangka peningkatan kesadaran dan pemahaman Jatidiri dan Karakter Bangsa dirumuskan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan Pakerti bangsa
 - b) Peningkatan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi
 - c) Peningkatan pemberdayaan komunitas adat
 - d) Peningkatan internalisasi kesejarahan dan wawasan kebangsaan
2. Arah kebijakan Peningkatan Apresiasi Masyarakat terhadap Keragaman serta kreativitas Nilai Budaya Seni dan Film :
 - a) Peningkatan sarana pengembangan, pendalaman dan pagelaran, seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten
 - b) Peningkatan perhatian kesertaan pemerintah dalam program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya
 - c) Peningkatan Apresiasi terhadap karya seni budaya dan perfilman
 - d) Peningkatan kreativitas dan Produktifitas para pelaku seni budaya dan perfilman
 - e) Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film
 - f) Peningkatan pemanfaatan sejarah dan nilai tradisional

Sudah tentu tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan ini memiliki tujuan dan sasaran yang diemban sehingga program yang dilaksanakan kompetitif dan akuntabel. Adapun **tujuannya** adalah memperkuat nilai-nilai budaya

dan keragaman Budaya di tengah pergaulan global, sedangkan **sasarannya** adalah *meningkatkan internalisasi nilai-nilai budaya, meningkatkan kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya, meningkatkan bantuan fasilitas sarana seni budaya.*

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB dan NTT sebagai UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan kepanjangan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Direktorat Jenderal yang dituangkan dalam Tusi kelembagaan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, NTB, dan NTT. Dalam proses pelaksanaan Tusi sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang kompleks dan multi demensional yang merupakan bagian dari persoalan bangsa yang selama ini. Di satu pihak kebudayaan selalu berkembang, bahkan berubah. Di pihak lain kita harus mampu mempertahankan jati diri dan karakter bangsa, sebagai pembeda antar bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Lebih khusus lagi, identitas kesukubangsaan yang ada di Indonesia tetap di gali, dan dipertahankan. Fenomena seperti ini akan selalu berkembang dan belum mampu diselesaikan secara tuntas oleh bangsa dan pemerintah.

Dampak pembangunan yang sedang dilaksanakan adalah terjadinya perubahan sosial dan budaya. Perubahan tersebut tidak sedikit akan menyebabkan tergeser dan berubahnya tata nilai kesejahteraan, ketradisionalan, seni dan film yang telah ada. Demikian pula, setelah memasuki era baru pasca reformasi, mulai tahun 1998 kita dihadapkan lagi permasalahan yang semakin rumit. Bahkan meliputi semua keutuhan nasional. Persoalan ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan bangsa akibat krisis ekonomi sejak tahun 1997 yang sampai saat ini masih belum diselesaikan secara tuntas. Bahkan akibat dari reformasi tersebut diformulasikan ada enam permasalahan pokok yang dihadapi bangsa, yakni : 1) munculnya gejala disintegrasi bangsa yang merebakkan konflik sosial; 2) lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia; 3) lambatnya pemulihan ekonomi; 4) rendahnya kesejahteraan rakyat; 5) meningkatnya penyakit sosial dan lemahnya ketahanan budaya nasional; dan 6) kurang berkembangnya potensi pembangunan daerah dan masyarakat.

Bertitik tolak dari permasalahan pertama tersebut di atas maka dipandang tepat adanya suatu wadah atau lembaga yang khusus menangani penelitian dan pengkajian dan pengembangan, serta pemanfaatan terhadap bidang sejarah, nilai tradisional, dan seni dan film seperti Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali, NTB dan NTT, yang pada tahun 1996, diberi nama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Akan tetapi lembaga ini tidak cukup hanya didirikan, namun dewasa sekarang yang lebih penting, bagaimana memaksimalkan Tusi BPNB Bali NTB dan NTT untuk menghadapi reformasi di segala bidang kehidupan sesuai dengan wilayah kajian.